

Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan & Gizi



Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian/
Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan

2019

**KEBIJAKAN STRATEGIS
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
2020 – 2024**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1. Perubahan Paradigma Ketahanan Pangan.....	1
2. Program Kerja Prioritas 2020-2024	2
3. Program Kerja Prioritas 2020-2024	3
4. Pentingnya Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi secara Sistemik	4
5. Tujuan dan ruang lingkup	6
II. SITUASI TERKINI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI	8
1. Penyediaan Pangan.....	10
2. Keterjangkauan Pangan	12
3. Pemanfaatan Pangan	20
III. TANTANGAN MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN	27
1. Supply.....	27
2. Demand.....	28
IV. PROYEKSI KONSUMSI PANGAN	30
1. Proyeksi Kependudukan dan Pendapatan Penduduk.....	30
2. Proyeksi Kebutuhan Konsumsi Pangan	32
3. Arah Penyediaan Pangan	36
V. KEBIJAKAN STRATEGIS	39
1. Prinsip Dasar Kebijakan Strategis	39
2. Aspek Kebijakan Strategis	45
VI. SASARAN	49
VII. RENCANA TINDAK LANJUT	55
VIII. PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ranking dan Skor Ketahanan Pangan Indonesia Berdasarkan GFSI	8
Tabel 2. Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per Hari tahun 2014-2018	11
Tabel 3. Konsumsi Energi dan Protein serta Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2014-2018.....	21
Tabel 4. Sasaran, Indikator dan Target Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Pikir Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi Secara Sistemik	6
Gambar 2.	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (BKP)	9
Gambar 3.	Rata-Rata Pertumbuhan per tahun Komoditas Pangan Strategis 2014-2018 (BPS dan Kementandiolah BKP)	10
Gambar 4.	Perkembangan Nilai PDB Indonesia Berdasarkan Harga Konstan 2012-2018 (Milyar Rupiah) (BPS).....	13
Gambar 5.	Perkembangan NTP/NTUP 2014-2018 (BPS)	13
Gambar 6.	Jumlah Penduduk Miskin 2014-2018 (juta jiwa) (BPS).....	14
Gambar 7.	Koefisien Variasi Komoditas Pangan Strategis (BPS diolah BKP)	15
Gambar 8.	Inflasi Bahan Makanan Tahun 2014-2018 (BPS).....	16
Gambar 9.	Angka Rawan Pangan (%) 2014-2018 (BPS diolah BKP)	17
Gambar 10.	Permasalahan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat	18
Gambar 11.	Perkembangan PPH Tahun 2014-2018 (Susenas BPS diolah BKP).....	22
Gambar 12.	Konsumsi Energi Beberapa Kelompok Pangan Tahun 2014-2018 (Susenas BPS diolah BKP)	22
Gambar 13.	Perkembangan Konsumsi Pangan Hewani 2014-2018 (Susenas BPS diolah BKP).....	22
Gambar 14.	Perkembangan Konsumsi Pangan Hewani 2014-2018 (Susenas BPS diolah BKP).....	23
Gambar 15.	Proporsi Status Gizi Buruk dan Gizi Kurang pada Balita 2007-2018 (Riskesmas 2018, Kementerian Kesehatan)	24
Gambar 16.	Proporsi Status Sangat Pendek dan Pendek pada Balita 2007-2018 (Riskesmas 2018, Kementerian Kesehatan)	24
Gambar 17.	Proporsi Status Gizi Sangat Pendek dan Pendek pada Balita 2007-2018 (Rskesdas 2018, kementerian Kesehatan).....	26
Gambar 18.	Proyeksi Penduduk Indonesia Berdasarkan Supas 2015 (BPS, 2015).....	30
Gambar 20.	Tren Demografi di Indonesia (World Population Prospects: the 2015 revision, United Nations Department of Social Affairs/Population Division).....	32
Gambar 21.	Proyeksi Konsumsi Beras per Kapita (BPS diolah BKP)	33
Gambar 22.	Proyeksi Konsumsi Daging Unggas (Arifin, B., dkk, 2018).....	34
Gambar 23.	Proyeksi Daging Ruminansia (Arifin, B., dkk, 2018)	34
Gambar 24.	Proyeksi Konsumsi Ikan (Arifin, B., dkk, 2018).....	35
Gambar 25.	Proyeksi Konsumsi Sayuran (Arifin, B., dkk, 2018)	35
Gambar 26.	Proyeksi Konsumsi Telur (Arifin, B., dkk, 2018).....	36
Gambar 27.	Proyeksi Konsumsi Umbi (Arifin, B., dkk, 2018)	36

I. PENDAHULUAN

1. Perubahan Paradigma Ketahanan Pangan

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh The United Nations International Children's Fund (Unicef) pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Seperti gayung bersambut, pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya. Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*).

Dalam pemahaman baru ini yang tergambar dari definisi ketahanan pangan dan gizi, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Peranan faktor pendukung tercapainya status gizi yang baik disebutkan secara eksplisit seperti yang tertuang dalam definisi FAO (2012).

*“Food and nutrition security exists when all people at all times have physical, social and economic access to food, which is safe and consumed in sufficient quantity and quality to meet their dietary needs and food preferences, **and is supported by an environment of adequate sanitation, health services and care, allowing for a healthy and active life.**”*

2. Program Kerja Prioritas 2020-2024

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, sistem pangan nasional menempatkan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagai spirit/pondasi dalam melaksanakan pembangunan pangan nasional. Kedaulatan negara dan bangsa dalam menentukan kebijakan dan sistem pangan dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak atas pangan bagi rakyat dengan mengutamakan potensi sumber daya lokal. Pada aspek kemandirian pangan, mengutamakan produksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri menjadi landasan untuk menjamin pemenuhan pangan hingga ke individu dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal secara bermartabat. Pada sisi capaian kinerja pembangunan, upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan tidak memisahkan ketahanan dan keamanan

pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk mencapai tujuan akhir yaitu individu dan masyarakat yang hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Merespon perubahan pendekatan global dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi telah mengintegrasikan pendekatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi untuk konteks Indonesia. Dalam PP tersebut definisi Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

3. Program Kerja Prioritas 2020-2024

Program kerja Presiden tahun 2020-2024 difokuskan pada 5 (lima) sasaran prioritas yaitu infrastruktur, sumberdaya manusia, investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan anggaran. Sasaran prioritas yang terkait langsung dengan pembangunan ketahanan pangan dan gizi adalah infrastruktur dan sumberdaya manusia. Pembangunan

infrastruktur difokuskan untuk membuka konektivitas dengan kawasan produksi rakyat seperti industri kecil; ekonomi khusus; pariwisata; persawahan; perkebunan; dan tambak perikanan. Pembangunan sumberdaya manusia ditekankan pada perbaikan kesehatan ibu hamil, balita dan anak sekolah; penguatan pendidikan vokasi yang berbasis ketrampilan; dan pengembangan lembaga manajemen talenta seperti diaspora.

Sejalan dengan program kerja Presiden, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang memfokuskan pada pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan kewilayahan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan politik, hukum dan pertahanan dan keamanan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dalam konteks RPJMN 2020-2024 menjadi target dari fokus pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, target dan sasaran RPJMN 2020-2024, khususnya yang terkait dengan pembangunan pangan dan penyediaan layanan dasar digunakan menjadi target dan sasaran yang harus dicapai dalam penyusunan kebijakan strategis ketahanan pangan dan gizi.

4. Pentingnya Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi secara Sistemik

Seiring perubahan arah pembangunan ketahanan pangan dunia yang mengintegrasikan pendekatan ketahanan pangan dan ketahanan gizi, kebijakan strategis di bidang ketahanan pangan dan gizi nasional sudah selayaknya mengadopsi pendekatan ini karena beberapa

alasan. *Pertama*, masalah gizi di Indonesia sebagai *outcome* dari situasi ketahanan pangan dan ketahanan gizi masih sangat serius. Kondisi ini dicirikan oleh tingginya prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek pada anak dibawah dua tahun), kegemukan pada anak balita dan orang dewasa, defisiensi zat gizi mikro (kurang vitamin A, anemia gizi besi dan gangguan akibat kekurangan iodium) serta semakin meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) karena buruknya pola konsumsi pangan masyarakat. *Kedua*, prevalensi masalah gizi dan PTM masih sangat tinggi. Kondisi ini terkait dengan persoalan-persoalan yang mendasarinya, yaitu masih relatif rendahnya kualitas (komposisi dan keamanan) pangan yang tersedia, keterbatasan akses pangan baik secara fisik maupun ekonomi karena terbatasnya daya beli, buruknya lingkungan fisik dan lingkungan (akses air bersih, higiene dan sanitasi lingkungan), pola asuh yang buruk sebagai akibat rendahnya pendidikan dan pengetahuan, dan keterbatasan akses layanan kesehatan.

Mempertimbangkan kondisi di atas, pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia pada masa mendatang, khususnya pada periode 2020-2024 harus menggunakan pendekatan sistem agar keterkaitan pembangunan lintas sektor dapat terjadi dan sinergitas antar sektor dapat tercapai melalui suatu koordinasi lintas sektor. Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan. Gambar 1 di bawah ini menyajikan Kerangka Pikir pendekatan lintas sektor pembangunan ketahanan pangan dan gizi secara sistemik. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan

keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur untuk mencegah merebaknya penyakit infeksi melalui peningkatan akses air bersih dan perbaikan lingkungan. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan. Dukungan berbagai kebijakan lainnya diperlukan guna memberikan stimulus produksi pangan; menjaga stabilitas politik; mengimplementasikan perdagangan internasional dan domestik yang adil; meningkatkan kualitas infrastruktur dan teknologi yang bukan hanya mampu meningkatkan produksi pangan tetapi juga menekan kehilangan pangan di tingkat petani, pedagang/distributor, dan rumah tangga.



Gambar 1. Kerangka Pikir Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi Secara Sistemik

5. Tujuan dan ruang lingkup

Tujuan penyusunan Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi (KSKPG) 2020-2024 ini ialah:

- Sebagai acuan (*common platform*) bagi para pemangku kepentingan di bidang pangan dan gizi, mulai dari instansi pemerintah di pusat dan daerah; sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi dan organisasi profesi;

kelembagaan dan organisasi petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan; jasa pelayanan masyarakat bidang pangan, gizi, dan kesehatan dalam peran dan upayanya untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi;

- b. Sebagai acuan dasar bagi lembaga pemerintah dan pemerintah daerah untuk membangun koordinasi lintas sektor sehingga terjadi sinergi program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi mendukung terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing;
- c. Sebagai dasar bagi kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan, program, dan anggaran yang memadai dalam mewujudkan sasaran pembangunan ketahanan pangan dan gizi.

Ruang lingkup pembahasan dalam buku ini, meliputi pencapaian pembangunan ketahanan pangan dan gizi hingga tahun 2018, situasi dan kondisi saat ini, target yang akan dicapai dan upaya yang dilakukan untuk merealisasikannya dengan melibatkan peran aktif lintas sektor yaitu pemerintah, akademisi, swasta/bisnis dan masyarakat.

II. SITUASI TERKINI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

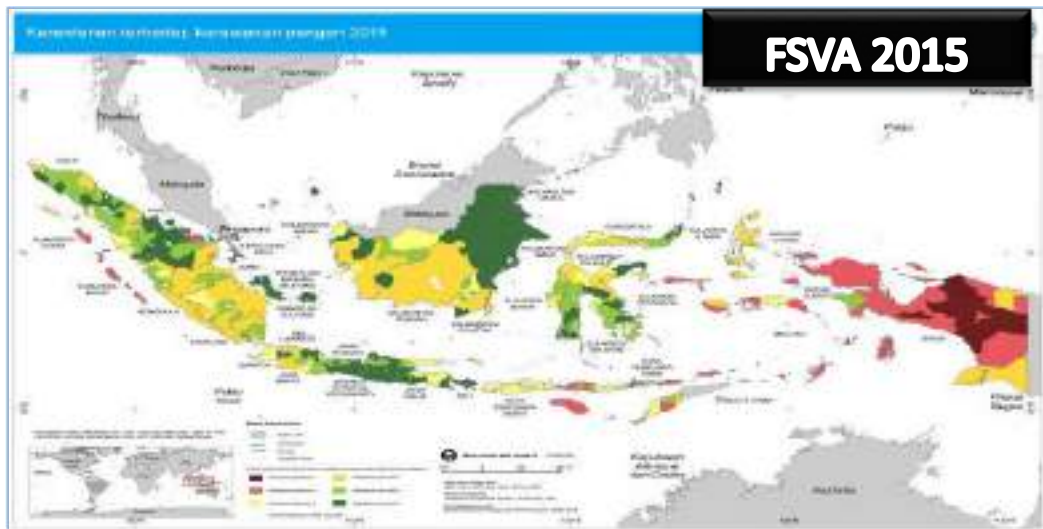
Pembangunan sektor pertanian yang dilaksanakan selama periode 2015-2019 telah mencatatkan hasil yang positif bagi pencapaian ketahanan pangan dan gizi nasional. Hal ini tercermin dari membaiknya peringkat ketahanan pangan Indonesia berdasarkan *Global Food Security Index* (GFSI 2019)³ dari posisi 74 (dari 113 negara) pada tahun 2015 menjadi 62 pada tahun 2019. Membaiknya peringkat ketahanan pangan Indonesia ini diukur dari meningkatnya aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, keamanan dan kualitas pangan serta ketahanan dan sumberdaya alam. Perbaikan skor GFSI dari tahun 2018 ke 2019 utamanya didukung oleh perbaikan pada aspek ketersediaan sebesar 3,1 poin dan keterjangkauan sebesar 5,2 poin.

Tabel 1. Ranking dan Skor Ketahanan Pangan Indonesia Berdasarkan Global Food Security Index

Tahun	Ketersediaan		Keterjangkauan		Keamanan dan Kualitas		Total	
	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor	Ranking	Skor
2014	-	-	-	-	-	-	72	46,5
2015	-	-	-	-	-	-	74	46,7
2016	66	54,1	70	50,3	87	42	71	50,6
2017	64	54,4	68	50,8	86	44,1	69	51,3
2018	58	58,2	63	55,2	84	44,5	65	54,8
2019	48	61,3	58	70,4	84	47,1	62	62,6

³ Global Food Security adalah Indeks Ketahanan Pangan Global yang diterbitkan oleh The Economist Intelligence Unit New York yang memberikan informasi tentang situasi ketahanan pangan dan gizi di 113 negara, mencakup situasi ketahanan pangan di tingkat nasional menurut indikatornya dan ranking ketahanan pangan dan gizi tiap negara secara relatif terhadap negara lainnya. Ada empat aspek yang diranking menurut GFSI, yaitu daya beli masyarakat terhadap pangan (*affordability*), ketersediaan pangan (*availability*), kualitas dan keamanan pangan (*quality and safety*), dan sumberdaya alam dan ketahanan menghadapi situasi darurat (*natural resources and resilience*)

Membayiknya peringkat ketahanan pangan Indonesia di tingkat global juga tercermin dari membayiknya situasi ketahanan pangan di tingkat nasional. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau dikenal dengan nama *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*, 177 kabupaten/kota mengalami peningkatan status ketahanan pangan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sejak 2015.

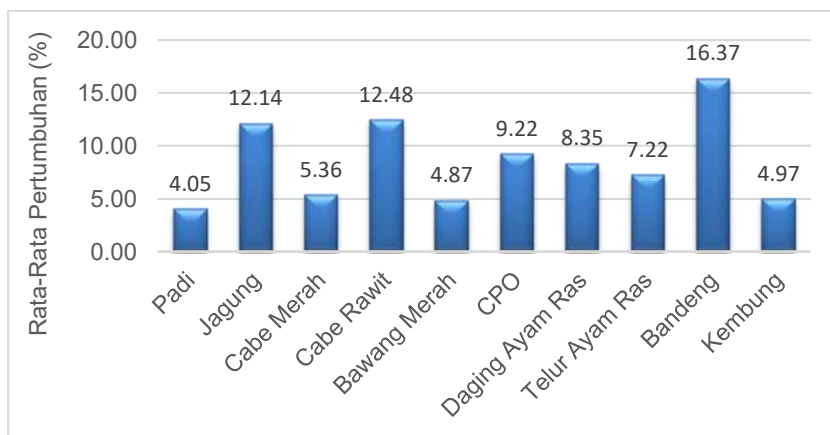


Gambar 2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (BKP)

Membayiknya situasi ketahanan pangan nasional tersebut disumbang oleh berbagai capaian pada aspek-aspek ketahanan pangan.

1. Penyediaan Pangan

Keberhasilan meningkatkan status ketahanan pangan tidak terlepas dari meningkatnya produksi beragam jenis bahan pangan dari sektor pertanian dalam arti luas. Produksi komoditas pangan strategis yang masuk pada Perpres Nomor 71 Tahun 2015 yaitu beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, daging ayam ras, telur, ikan bandeng, dan ikan kembung mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir. Dalam periode 2014 - 2018 produksi padi dan jagung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan per tahun masing-masing sebesar 4,05 persen dan 12,14 persen. Produksi tiga komoditas penting hortikultura yaitu cabai merah, cabe rawit, dan bawang merah juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan per tahun rata-rata 5,36 persen, 12,48 persen, dan 4,86 persen (Gambar 3).



Gambar 3. Rata-Rata Pertumbuhan per tahun Komoditas Pangan Strategis 2014-2018 (BPS dan Kementan diolah BKP)

Sebagai bahan baku utama minyak goreng, produksi minyak sawit mentah (CPO) dalam periode 2014 - 2018 terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 9,22 persen per tahun. Peningkatan produksi juga tercatat pada sektor peternakan dan perikanan. Produksi daging dan telur ayam ras meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 8,35 persen dan 7,22 persen. Sementara komoditas penting

perikanan, yaitu bandeng dan kembung meningkat produksinya dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 16,37 persen dan 4,97 persen.

Dari sisi ketersediaan energi dan protein, yang merupakan cerminan dari ketersediaan pangan secara agregat, Indonesia memiliki ketersediaan pangan lebih dari cukup dibandingkan dengan standar kebutuhannya. Selama periode lima tahun (2014-2018) ketersediaan energi per kapita per hari rata-rata sebesar 3.110 kilokalori, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012 sebesar 2.400 kilo kalori. Rata-rata ketersediaan protein per kapita per hari sebesar 79,38 gram juga lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi standar kebutuhannya sebesar 63,0 gram (Tabel 2). Namun demikian, ketersediaan agregat ini juga telah memperhitungkan volume impor komoditas pangan tertentu yang produksinya masih kurang atau belum bisa diproduksi dalam jumlah besar di Indonesia.

Tabel 2. Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per Hari tahun 2014-2018

Tahun	Ketersediaan						Skor PPH Ketersediaan
	Energi (Kkal/kapita/hari)			Protein (gram/kapita/hari)			
	Nabati	Hewani	Total	Nabati	Hewani	Total	
2014	3.047	172	3.219	62,12	17,78	79,89	82,80
2015	2.799	178	2.978	59,75	18,53	78,28	81,59
2016	2.825	192	3.016	56,25	19,55	75,79	83,27
2017*	2.838	193	3.031	57,22	21,82	79,04	83,04
2018**	3.098	207	3.305	60,00	23,91	83,91	87,99

*) Sementara

Sumber: Neraca Bahan Makanan

***) Sangat Sementara

Impor untuk beberapa komoditas pangan masih dilakukan dalam persentase yang relatif kecil dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional, kecuali untuk komoditas pangan tertentu seperti gandum/terigu, gula, kedelai, dan susu. Impor gandum sebagai bahan

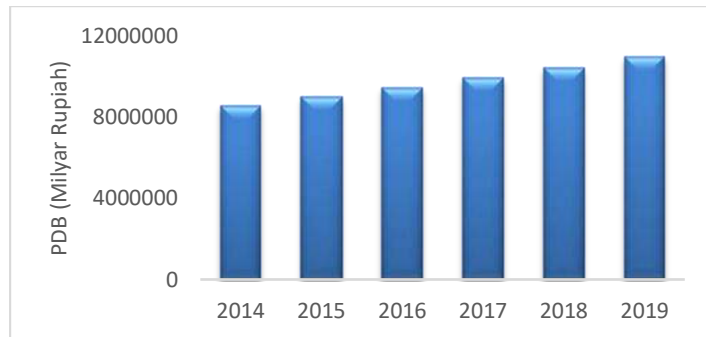
baku tepung terigu sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga, kebutuhan industri mie, bakery, kue, biskuit, gorengan dan tepung bumbu. Konsumsi rumah tangga terigu tahun 2017 tercatat sebesar 14 kg/kapita/tahun. Besarnya konsumsi tepung terigu ini menjadi tantangan bagi pakar teknologi pangan dan pelaku industri olahan pangan untuk meningkatkan produksi tepung-tepungan berbahan baku pangan lokal sebagai substitusi bagi tepung terigu. Bahan pangan lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi tepung-tepungan diantaranya ubi kayu, sagu, ubi jalar, talas, serta sereal dan umbi-umbian lainnya selain beras. Diluar komoditas-komoditas tersebut kebutuhan pangan sumber protein seperti hasil-hasil unggas dan ikan seluruhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Dari sisi ekspor pangan, Indonesia mengekspor CPO lebih dari 26 juta ton pada tahun 2018. Selain CPO, ekspor komoditas pangan yang cukup besar pada tahun 2018 antara lain jagung, tuna/tongkol/cakalang, udang dan nenas.

2. Keterjangkauan Pangan

Peningkatan status ketahanan pangan pada periode 2014-2018 juga dipengaruhi oleh capaian pembangunan ketahanan pangan dari aspek keterjangkauan pangan. Keterjangkauan pangan merupakan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik. Keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas harga pangan, maupun tingkat kemiskinan. Selain itu pengeluaran untuk pangan juga dapat dijadikan indikator keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi karena dapat menunjukkan volume dan ragam bahan pangan yang dibeli oleh masyarakat.

Peningkatan keterjangkauan pangan salah satunya terlihat pada peningkatan daya beli masyarakat yang direfleksikan dengan peningkatan produk domestik bruto (PDB). PDB perkapita tahun 2018 dan 2019 dilaporkan sebesar Rp. 39,47 juta dan Rp. 41,02 juta, naik dibandingkan PDB per kapita tahun 2014 sebesar Rp. 33,97 juta.



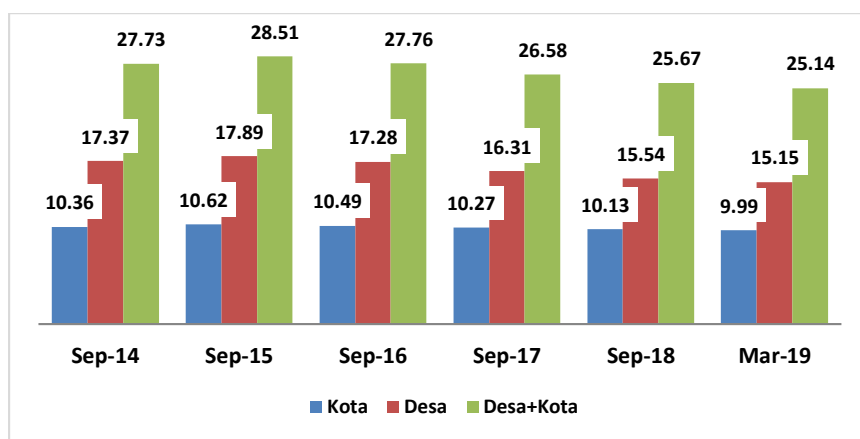
Gambar 4. Perkembangan Nilai PDB Indonesia Berdasarkan Harga Konstan 2012-2018 (Milyar Rupiah) (BPS)

Selain itu, meningkatnya capaian ketahanan pangan juga dapat dinilai dari meningkatnya kesejahteraan petani yang dapat dilihat dari meningkatnya NTP sebesar 0,22% dari 102,03 pada tahun 2014 menjadi 102,25 pada tahun 2018 dan dari meningkatnya Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) sebesar 5,39% dari 106,05 tahun 2014 menjadi 111,77 tahun 2018.



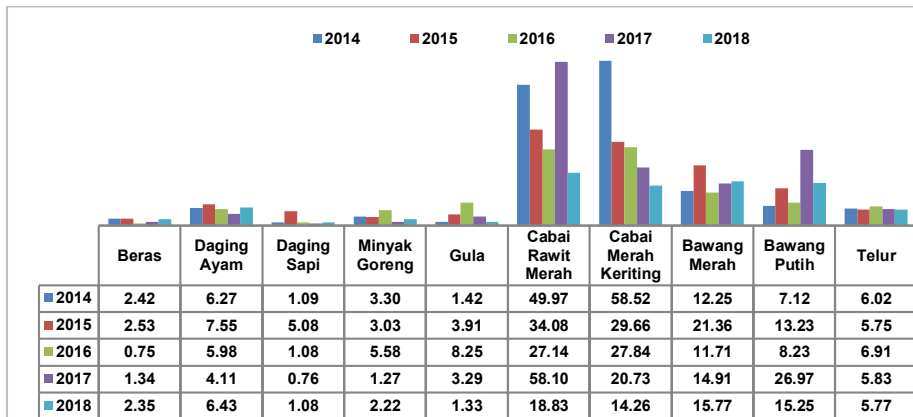
Gambar 5. Perkembangan NTP/NTUP 2014-2018 (BPS)

Meningkatnya daya beli masyarakat berpengaruh terhadap menurunnya jumlah penduduk miskin Indonesia. Proporsi dan jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun dari 10,96 persen dan 27,73 juta jiwa pada periode September 2014 menjadi 9,66 persen dan 25,67 juta jiwa pada September 2018.



Gambar 6. Jumlah Penduduk Miskin 2014-2018 (juta jiwa) (BPS)

Selanjutnya harga pangan juga memberikan pengaruh terhadap keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. Selama periode tahun 2014 – 2018 hampir semua komoditas cenderung tidak mengalami fluktuasi harga atau relatif stabil. Untuk harga komoditas beras, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng dan gula pasir dinyatakan stabil jika koefisien variasinya (CV) maksimal 10%. Sementara untuk bawang merah maksimal 25% dan cabai merah dan cabai rawit maksimal 30%.



Gambar 7. Koefisien Variasi Komoditas Pangan Strategis (BPS diolah BKP)

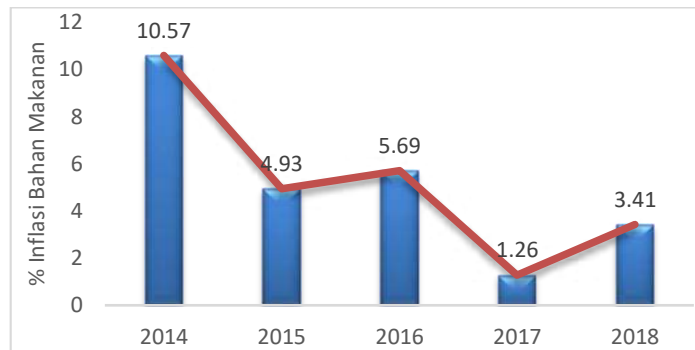
Harga komoditas beras, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng dan gula pasir selama 2014-2018 cenderung stabil, dengan nilai CV jauh lebih kecil dari 10%. Khusus untuk beras, CV selama 5 tahun terakhir hanya berkisar antara 0.75-2.53%. Hal ini menunjukkan bahwa harga beras dalam kondisi stabil.

Komoditas hortikultura yaitu bawang merah dan cabai merah keriting dan cabai rawit merupakan komoditas yang rawan mengalami fluktuasi harga karena terkait dengan sifat fisiknya yang mudah rusak. Namun demikian, nilai CV harga bawang merah selama 2014-2018 hanya berkisar 11.73-21.36% (lebih kecil dari 25%) sehingga dapat dinyatakan stabil.

Sedangkan komoditas cabai merah keriting dan cabai rawit merah pada tahun 2014 mempunyai nilai CV tertinggi yaitu 49.97-58.52% namun terus menurun hingga 14.26-18.83% di tahun 2018 yang merupakan nilai CV terendah, nilai CV ini menunjukkan bahwa harga cabai merah keriting dan cabai rawit merah ditahun 2018 paling stabil harganya selama periode 2014 – 2018. Tingginya CV harga cabai rawit merah pada tahun 2017 disebabkan oleh lonjakan harga yang terjadi pada Bulan Februari yang mencapai Rp. 109.000/kg yang diikuti oleh upaya stabilisasi harga sehingga harga langsung

terkoreksi menjadi Rp. 54.500/kg pada bulan April dan terus mengalami penurunan sampai akhir tahun. Perubahan harga ini menyebabkan angka CV melonjak mencapai 58.10%, namun dalam bentuk penurunan harga di tingkat konsumen, sehingga menguntungkan masyarakat.

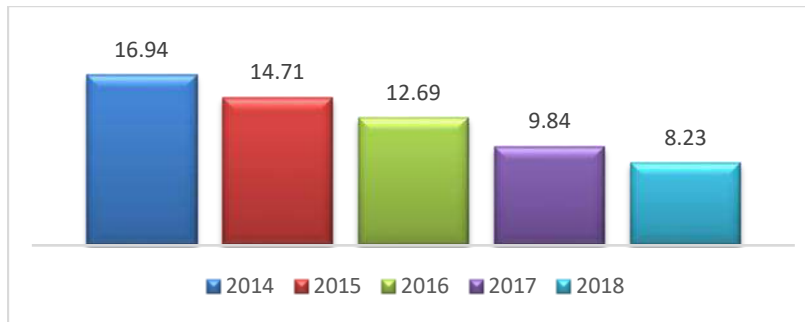
Stabilnya harga pangan tersebut berkontribusi positif terhadap menurunnya inflasi bahan makanan pada periode 2014-2018. Angka inflasi bahan makanan menurun tajam dari 10,57 persen pada tahun 2014 menjadi 4,93 persen pada tahun 2015, dan menurun kembali menjadi 1,26 persen pada tahun 2017.



Gambar 8. Inflasi Bahan Makanan Tahun 2014-2018 (BPS)

Selain itu, proporsi pengeluaran tertinggi di perkotaan dan perdesaan untuk pangan sejak tahun 2014 dan tahun 2018 telah bergeser dari kelompok padi-padian menjadi kelompok makanan dan minuman jadi, yaitu antara 26,72 persen (2014) dan 33,98 persen (2018). Tingkat pengeluaran tertinggi di perkotaan digunakan untuk kelompok makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar 32,47 persen (2014) dan 38,22 persen (2018). Sementara pengeluaran terbesar penduduk perdesaan adalah untuk kelompok padi-padian sebesar 19,71 persen (2014) menjadi 15,51 persen pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 21,30 persen.

Meningkatnya daya beli masyarakat dan stabilnya harga pangan turut berperan pada menurunnya angka rawan pangan (%). Berdasarkan perhitungan Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) angka rawan pangan menunjukkan tren membaik dari 16.94 persen (2014) menurun menjadi 8,23 persen (2018).



Gambar 9. Angka Rawan Pangan (%) 2014-2018 (BPS diolah BKP)

Produksi pangan dihasilkan di wilayah tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Produksi terpusat di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera (surplus) sedangkan wilayah lainnya merupakan daerah non sentra produksi (defisit). Sementara itu konsumsi pangan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dalam jumlah yang relatif tetap sepanjang waktu. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan sangat luas menyebabkan jarak antara wilayah produsen dan konsumen relatif jauh karena wilayah konsumen tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu infrastruktur logistik dan infrastruktur transportasi masih kurang memadai untuk mendukung kelancaran arus barang dari wilayah surplus ke daerah defisit. Kondisi ini menyebabkan arus barang menjadi tidak efektif dan efisien karena biaya pengangkutan dan pemasaran (MPP) masih tinggi.

Selain itu, pola panen antar waktu menyebabkan adanya variasi pasokan (*supply*). Variasi pasokan akan menyebabkan harga mudah

berfluktuasi antar waktu menurut pola panen komoditas karena pada saat terjadi panen raya, pasokan akan meningkat dan sebaliknya pada periode paceklik pasokan akan berkurang. Hal ini menyebabkan petani menghadapi resiko produksi dan resiko harga yang tinggi. Sebagian besar petani merupakan produsen skala kecil dan kualitas produknya sangat bervariasi sehingga dibutuhkan kelembagaan pemasaran yang baik.



Gambar 10. Permasalahan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat

Kebijakan ketahanan pangan harus memberikan jaminan bagi masyarakat miskin untuk dapat menjangkau bahan pangan yang mencukupi. Salah satu upaya untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat miskin terhadap pangan adalah transformasi Rastra menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT) yang dapat ditukarkan untuk bahan pangan beras dan telur. Hasil evaluasi yang dilakukan Microsave (2019) menunjukkan bahwa program Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT): a). efektif membantu menurunkan kemiskinan, ketimpangan dan stunting. b). mewujudkan keuangan inklusi dengan mendorong perubahan perilaku KPM untuk mengenal transaksi non tunai, c). melibatkan masyarakat secara aktif untuk kerja sosial dan mengembangkan usaha produktif seperti e-Warong tempat KPM mengambil bansos, dan d). memiliki jangkauan yang luas. Keterjangkauan pangan juga memperhatikan masyarakat korban bencana dalam bentuk bantuan pangan darurat. Pemberian pangan darurat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan yang dapat mengakibatkan penyakit ataupun kematian di antara para korban. Pangan yang diberikan harus memiliki kandungan gizi yang lengkap sesuai dengan asupan harian, sampai datangnya bantuan pangan yang lebih lengkap.

Hingga saat ini, perencanaan dan penyediaan pangan darurat di Indonesia sangat beragam. Bantuan pangan untuk pengungsi masih didominasi oleh produk instan terutama mie. Pemberian bantuan pangan seperti ini mungkin tidak masalah jika pengungsi masih memiliki akses ke pangan lainnya yang jika dikombinasikan dapat memenuhi kebutuhan gizi harian. Sebaliknya, jika pengungsi hanya mengonsumsi pangan yang diberikan tanpa ada kombinasi dengan pangan yang lain, maka pemberian pangan darurat yang seperti ini menjadi tidak tepat. Ke depannya bantuan pangan darurat harus lebih memperhatikan aspek komposisi gizi, kepraktisan/dapat dikonsumsi langsung dan mudah untuk didistribusikan. Semua kriteria ini terutama menjadi sangat penting jika akses terhadap air bersih, peralatan masak dan bahan pangan lain sulit sehingga kelangsungan hidup korban benar-benar tergantung pada pangan darurat yang tersedia. Alternatif produk pangan darurat berupa pangan pokok lengkap dengan sayur dan lauk pauk yang diproses dengan aplikasi

termal (kaleng) seperti yang digunakan oleh TNI/Polri untuk bekal makanan prajurit saat penugasan. Produk tersedia dalam bentuk paket yang terdiri dari makanan dan dilengkapi dengan air minum. Selain karena teknologinya yang relatif mudah, keunggulan dari paket pangan darurat ini memiliki umur simpan yang panjang, komposisi gizi yang lengkap, citarasa yang disukai, dapat langsung dikonsumsi dan lauknya bisa dibuat bervariasi.

3. Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, dan pengetahuan pangan dan gizi. Kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status gizi, namun penyerapan gizi dalam tubuh dipengaruhi oleh kondisi fisik seseorang. Untuk dapat hidup secara sehat, aktif dan produktif, maka diperlukan asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi tersebut dilakukan dengan penerapan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang dimulai dari keluarga. Beberapa parameter sebagai indikator perkembangan kualitas pemanfaatan pangan dan status gizi masyarakat disajikan berikut ini.

3.1. Konsumsi Energi, Protein dan PPH Konsumsi

Dalam kurun waktu 2014 – 2018, total konsumsi energi dan protein dari berbagai jenis kelompok pangan, menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Konsumsi energi pada tahun 2018 telah melebihi rekomendasi WNPG sebesar 2150 kkal/kapita/hari. Konsumsi protein rata-rata penduduk juga telah melebihi anjuran kecukupan gizi 57 gram/kapita/hari, namun masih didominasi oleh protein dari sumber pangan nabati.

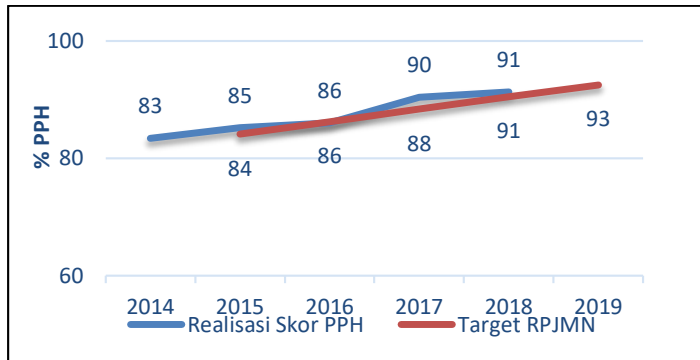
Tabel 3. Konsumsi Energi dan Protein serta Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2014-2018

Uraian	Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Per Hari					Rekomendasi WNPB	
	2014	2015	2016	2017	2018	s.d 2012	2013
1. Energi (kkal)	1949	2099	2147	2128	2165	2000	2150
2. Protein (gram)	56,64	58,56	60,25	61,45	62,91	52,0	57,0
Nabati	39,03	40,06	40,95	40,59	42,66		
Hewani	17,61	18,50	19,30	20,86	20,20		

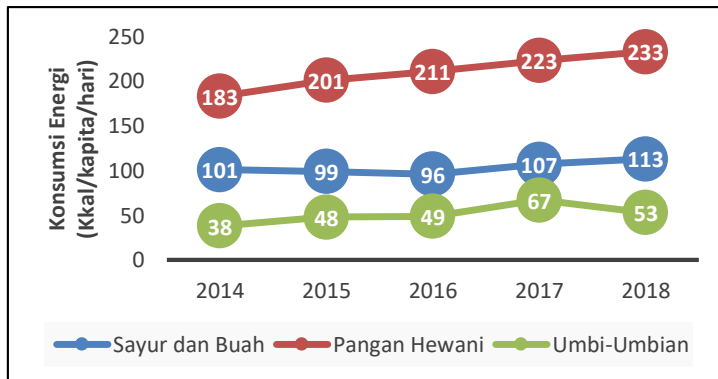
Pemenuhan konsumsi pangan tidak hanya pemenuhan dalam hal kuantitas saja, yang dicerminkan dengan total energi dan protein, namun juga harus memperhatikan aspek keberagaman dan keseimbangan zat gizi, yang ditunjukkan melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH cenderung meningkat dan pada tahun 2018 pencapaian skor PPH sebesar 91,3 (Gambar 11). Peningkatan PPH tersebut, disumbang terbesar oleh peningkatan energi dari pangan hewani (Gambar 12).

Secara umum, konsumsi pangan dalam kelompok pangan hewani mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun 2014, peningkatan terbesar pada konsumsi daging ruminansia, pada tahun 2018 sebesar 5 kg/kap/tahun meningkat dari tahun 2014 sebesar 2 kg/kapita/tahun (Gambar 13). Walaupun beberapa kelompok pangan meningkat, Namun konsumsi kelompok pangan hewani, sayur dan buah serta kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan masih perlu ditingkatkan karena masih dibawah persentase anjuran kecukupan,

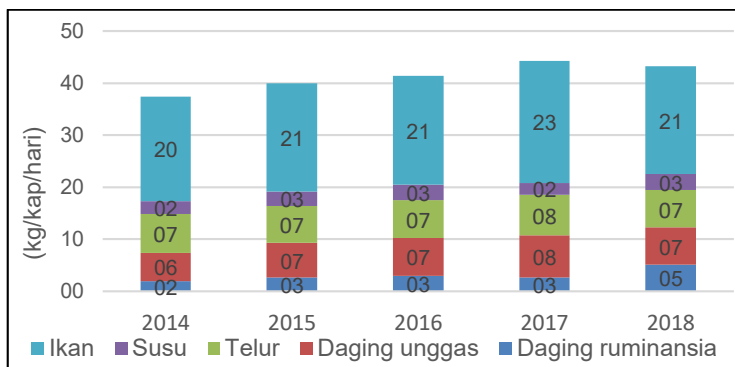
sedangkan konsumsi padi-padian, gula, minyak dan lemak telah melebihi anjuran kecukupan (Gambar 14).



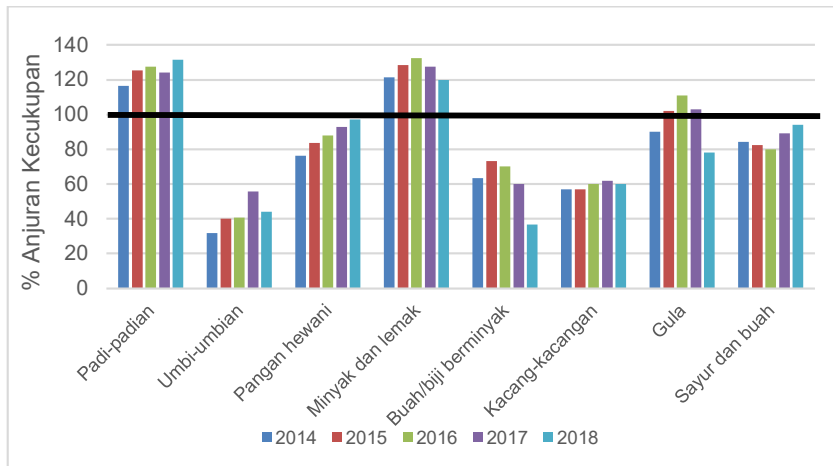
Gambar 11. Perkembangan PPH Tahun 2014-2018 (Susenas BPS diolah BKP)



Gambar 12. Konsumsi Energi Beberapa Kelompok Pangan Tahun 2014-2018 (Susenas BPS diolah BKP)



Gambar 13. Perkembangan Konsumsi Pangan Hewani 2014-2018 (Susenas BPS diolah BKP)



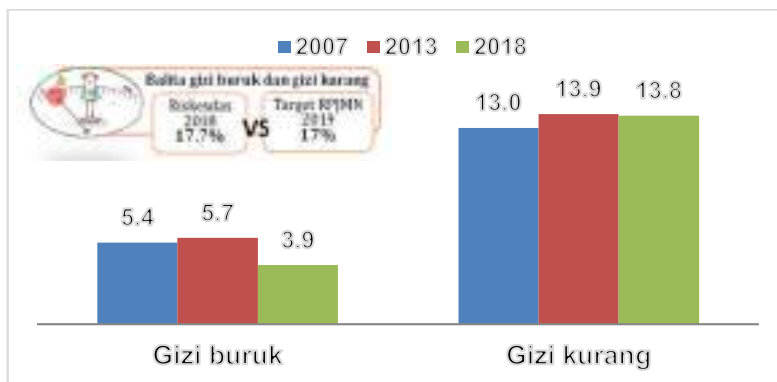
Gambar 14. Perkembangan Konsumsi Pangan Hewani 2014-2018 (Susenas BPS diolah BKP)

3.2. Pengaruh Kondisi Rentan Rawan Pangan Terhadap Status Gizi

Persentase kekurangan gizi/energi merupakan indikator rentan rawan pangan, penduduk dengan konsumsi energi kurang dari 1.400 kkal/kapita atau kurang dari 70 persen dari AKG dapat di kelompokkan dalam rawan pangan. Angka kerawanan pangan selama lima tahun mengalami kecenderungan yang menurun. Persentase penduduk rawan pangan tahun 2014 sebesar 16,94 persen turun menjadi 8,23 persen pada tahun 2018. Penurunan ini sebagai dampak dari kebijakan pemerintah secara holistik dalam penanganan kemiskinan dan rawan pangan, antara lain kebijakan peningkatan produktivitas di sektor pertanian, perluasan kesempatan kerja, pemberian subsidi serta perluasan akses pelayanan dasar khususnya bagi rumah tangga miskin yang rentan rawan pangan.

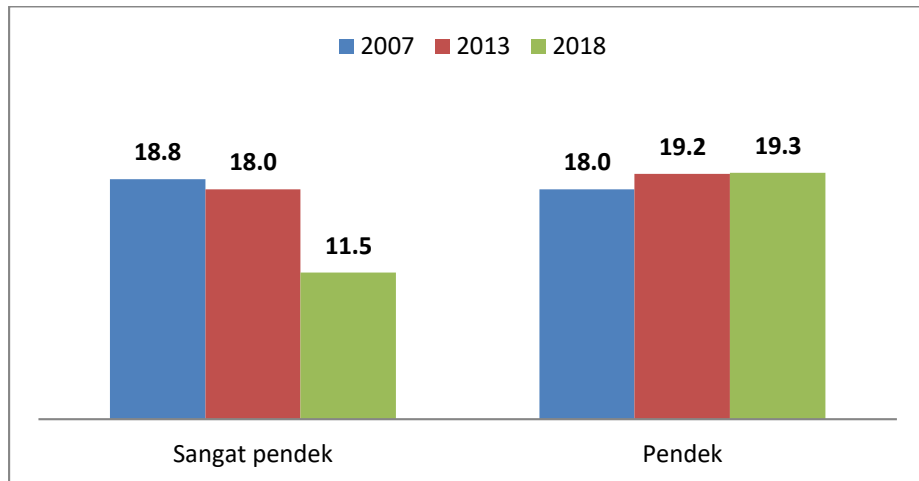
Selain rawan pangan, secara nasional, Indonesia mengalami tiga beban gizi yang masih melingkupi sistem pangan. **Pertama**, masalah kekurangan gizi pada anak usia balita. Hasil Riset

Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat prevalensi kurang gizi (*malnutrition*), terutama anak usia Balita di Indonesia mencapai 17,7 persen (terdiri dari 3,9% gizi buruk dan 13,8% gizi kurang). Angka tersebut telah menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar 19,6 persen (5,7% gizi buruk dan 13,9% gizi kurang) (Gambar 15).



Gambar 15. Proporsi Status Gizi Buruk dan Gizi Kurang pada Balita 2007-2018 (Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan)

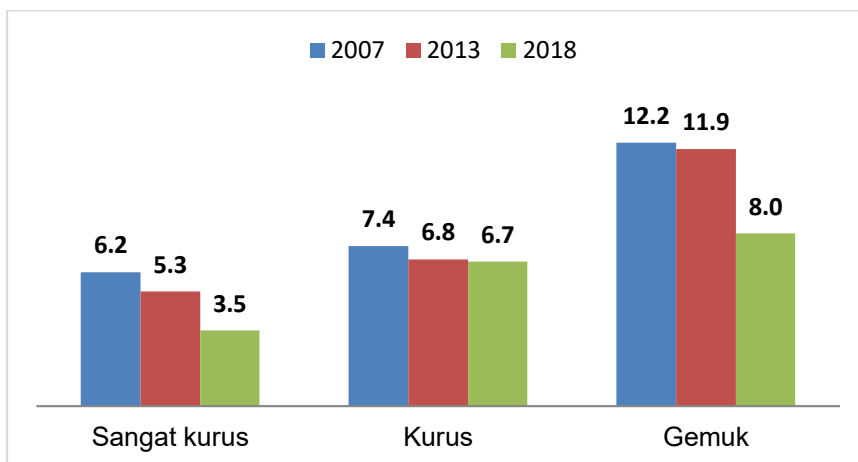
Kedua, fenomena anak pendek (*stunting*) saat ini tercatat 30,8%, menurun dari 37,2% pada tahun 2013 (Riskesdas, 2018). Secara teknis kesehatan, anak pendek adalah salah satu bentuk output dari kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama. Tingkat kesejahteraan ibu hamil dan menyusui menjadi amat krusial, karena proses stunting telah dimulai sejak proses konsepsi janin (gambar 16).



Gambar 16. Proporsi Status Gizi Sangat Pendek dan Pendek pada Balita 2007-2018 (Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan)

Ketiga, Indonesia mengalami masalah kelebihan gizi yaitu *overweight* dan obesitas yang cenderung mengalami peningkatan prevalensinya pada kelompok usia diatas 18 tahun. Pada tahun 2013 angka obesitas usia diatas 18 sebesar 14,8% meningkat menjadi 21,8%. Pada usia balita juga masih mengalami obesitas, walaupun menurun dari 2013, namun pada tahun 2018, prevalensinya masih 8% (Gambar 17). Fenomena gizi lebih merupakan ancaman yang serius karena sampai saat ini merupakan salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit degeneratif. Gizi lebih terjadi akibat adanya gangguan keseimbangan energi, yang dipengaruhi berbagai faktor, antara lain pola makan anak, tingkat dan pola aktivitas anak, faktor genetik dan faktor lain dari lingkungan.

Tidak hanya masalah gizi makro, namun juga masalah zat gizi mikro seperti kekurangan vitamin dan mineral. Permasalahan anemia pada ibu hamil, kekurangan vitamin A, kekurangan mineral Iodium masih menjadi beban gizi yang perlu ditangani bersama.



Gambar 17. Proporsi Status Gizi Kurus dan Gemuk pada Balita 2007-2018 (Rskesdas 2018, kementerian Kesehatan)

III. TANTANGAN MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN

Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi tantangan-tantangan baik dari sisi *supply* (penyediaan) dan sisi *demand* (permintaan) pangan.

1. *Supply*

Dari sisi *supply*/penyediaan pangan, penyediaan pangan menghadapi tantangan serius akibat berbagai faktor yang mempengaruhi, diantara yang terpenting adalah dari sisi produksi dan distribusi:

A. Produksi

- Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan OPT dan ketersediaan air.
- Skala usaha pertanian yang didominasi oleh usahatani kecil disertai oleh laju konversi lahan yang cukup tinggi.
- Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata.
- Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan belum dilaksanakan secara masif.
- Regenerasi petani berjalan lambat, sehingga pengelolaan pertanian saat ini didominasi oleh SDM yang relatif tua.
- Tingginya *food loss and waste*. *Food loss* (kehilangan pangan) selama proses panen, pasca panen dan distribusi akibat masih belum maksimalnya teknologi pasca panen dalam pencegahan kehilangan pangan dan persoalan terkait agrolistik (infrastruktur jalan, fasilitas pendingin, kondisi geografis sebagai implikasi negara kepulauan dan luasnya wilayah, dll). *Food waste* (pangan yang terbuang) terjadi pada tingkat ritel dan konsumen akibat

perencanaan pembelian dan penyediaan makanan yang kurang bijak dan perilaku menyisakan makanan.

B. Distribusi

- Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (miskin) dan fisik (daerah terpencil).
- Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai.
- Sebaran wilayah produksi di daerah-daerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen.
- Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.

2. Demand

Sementara itu pada sisi permintaan pangan, tantangan yang dihadapi antara lain:

- Pertumbuhan penduduk Indonesia yang disertai dengan meningkatkan jumlah penduduk usia produktif dan laju urbanisasi membawa pergeseran dalam gaya hidup dan preferensi terhadap makanan.
- Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia yang mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat lebih beragam dan memilih lebih banyak protein, buah dan sayuran.
- Keamanan pangan, terutama akibat penggunaan bahan berbahaya pada saat produksi pangan (khususnya pestisida yang meninggalkan residu pada sayuran dan buah), residu logam berat pada perairan tertentu yang berakibat pada tidak amannya pangan yang diproduksi setempat, atau penggunaan bahan kimia berbahaya untuk ditambahkan pada makanan seperti pewarna tekstil, boraks, formalin, dan lain-lain masih menjadi masalah serius

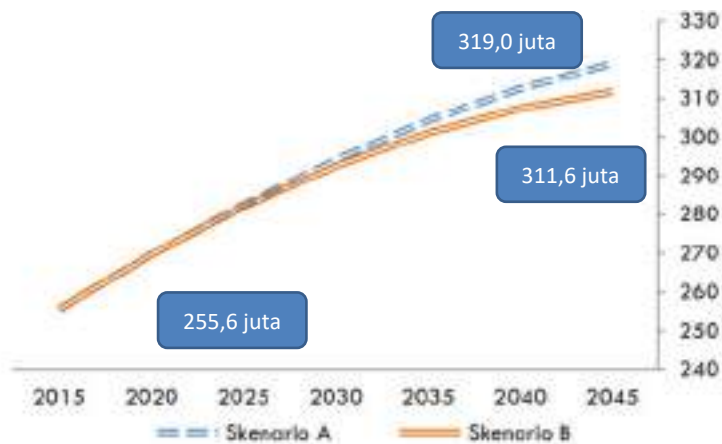
di sebagian besar wilayah di Indonesia. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat.

- Meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif.
- Meningkatnya permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsinya.
- *Triple burden malnutrition* yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi (*overweight* dan obesitas), dan kekurangan zat gizi mikro yang masih cukup tinggi terjadi di Indonesia.

IV. PROYEKSI KONSUMSI PANGAN

1. Proyeksi Kependudukan dan Pendapatan Penduduk

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hasil Sensus Penduduk 2010 mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 237,6 juta jiwa. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus meningkat dimana pada tahun 2045 penduduk Indonesia akan mencapai 311,6 – 319,0 juta jiwa (BPS, 2018).



Gambar 18. Proyeksi Penduduk Indonesia Berdasarkan Supas 2015 (BPS, 2015)

Skenario A (skenario 8=tren fertilitas stagnan 2,1 sejak tahun 2020, tren mortalitas mengikuti target SDGs turun 3% setiap tahun sejak 2015) dan scenario B (skenario 5=tren fertilitas mengikuti penurunan tren fungsi logistik) (BPS, 2018).

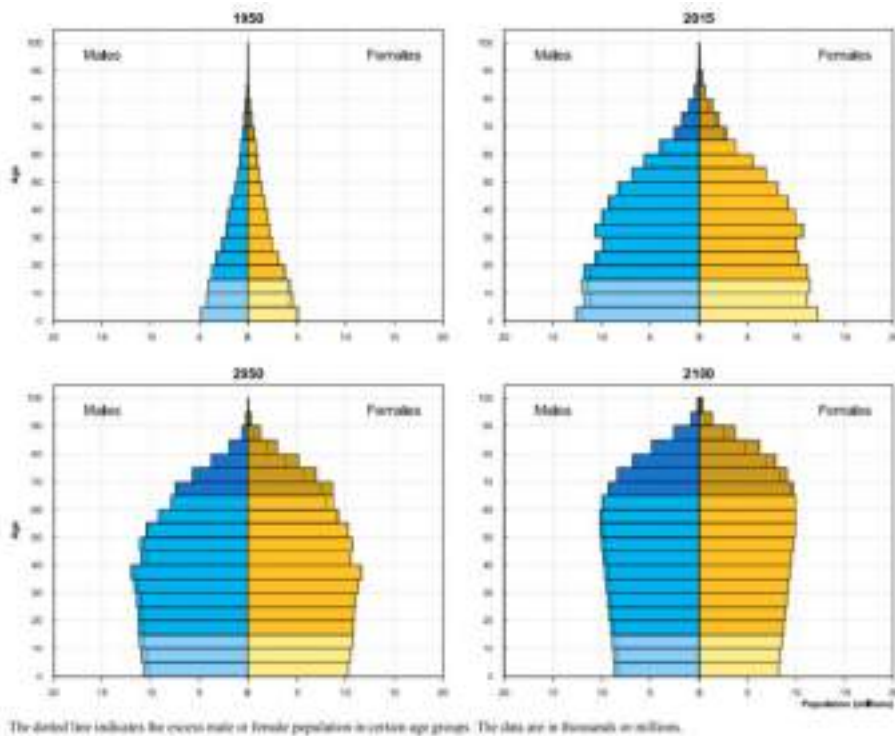
Penduduk kelas menengah Indonesia pada 2020 juga diproyeksikan akan mencapai 85 juta (31% dari total penduduk) dan pada 2045 meningkat menjadi 256 juta (80% dari total penduduk) (Bappenas, 2017). Saat ini, pendapatan rata-rata per kapita pada tahun 2018 sebesar Rp 56 juta atau US\$3.927, naik 7,92 persen dari tahun 2017 sebesar Rp 51,89 juta atau US\$3.876,8 per tahun (BPS 2018).

Besaran pendapatan per kapita tersebut, berada diambang batas negara kelompok berpendapatan menengah tinggi berdasarkan Bank Dunia (2018) sebesar 3,956 US\$ - 12,235 US\$.



Gambar 19. Penduduk Berdasarkan Kelas Pendapatan (Bappenas, 2017)

Ke depan, penduduk Indonesia tidak hanya lebih padat dan sejahtera, tetapi juga secara demografis lebih produktif. Angkatan kerja diproyeksikan akan tumbuh selama 30 tahun ke depan dengan tingkat pertumbuhan per tahun sebesar 0,7%. Pada 2045, angkatan kerja diprediksi mencapai 172,1 juta. Oleh karena itu investasi di bidang pangan dan pertanian sangat diperlukan untuk menjamin ketahanan pangan dan gizi.



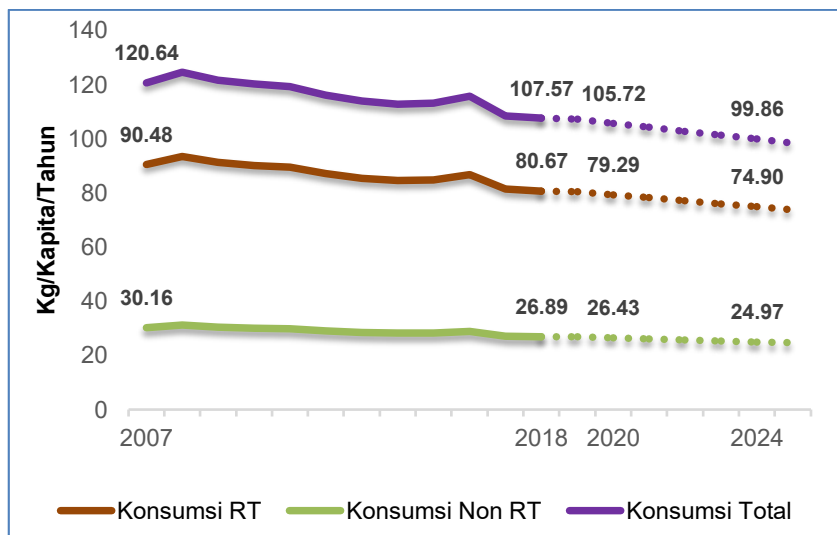
Gambar 20. Tren Demografi di Indonesia (World Population Prospects: the 2015 revision, United Nations Department of Social Affairs/Population Division)

2. Proyeksi Kebutuhan Konsumsi Pangan

Jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat secara langsung akan meningkatkan total kebutuhan konsumsi pangan. Peningkatan kebutuhan konsumsi pangan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan maupun migrasi penduduk yang menyebabkan bergesernya preferensi pangan. Sementara itu, berdasarkan proyeksi yang disusun oleh tenaga ahli Bappenas, WFP dan FAO, permintaan pangan Indonesia di masa depan ditentukan oleh permintaan saat ini, tingkat pendapatan, harga dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku dan tren konsumsi pangan (Arifin, B., dkk, 2018).

Meskipun total kebutuhan konsumsi pangan meningkat, konsumsi pangan untuk komoditas tertentu diproyeksikan menurun apabila

melihat tren konsumsi pangan selama 10 tahun terakhir. Dengan menggunakan data perkembangan konsumsi beras per kapita periode tahun 2007-2018, konsumsi total beras per kapita per tahun diperkirakan akan menurun menjadi 105,72 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 dan menjadi 99,86 kg/kapita/tahun pada tahun 2024. Penurunan konsumsi total tersebut diperkirakan sebagai akibat dari penurunan konsumsi beras pada tingkat rumah tangga dari 80,67 kg/kapita/tahun pada tahun 2018 menjadi 74,90 kg/kapita/tahun pada tahun 2024 dan penurunan konsumsi beras di luar rumah tangga dari 26,89 kg/kapita/tahun pada tahun 2018 menjadi 24,97 kg/kapita/tahun pada tahun 2024 (Gambar 21).

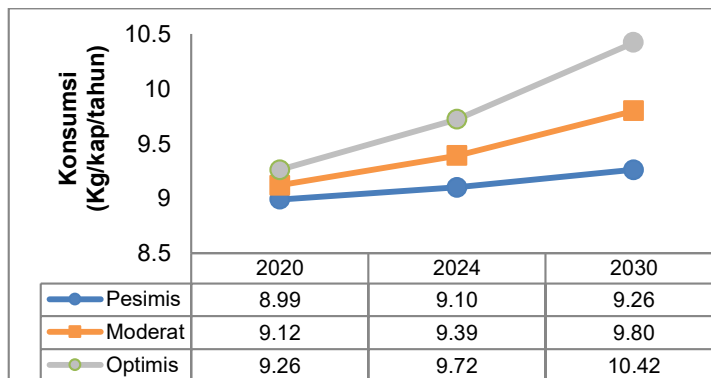


Gambar 21. Proyeksi Konsumsi Beras per Kapita (BPS diolah BKP)

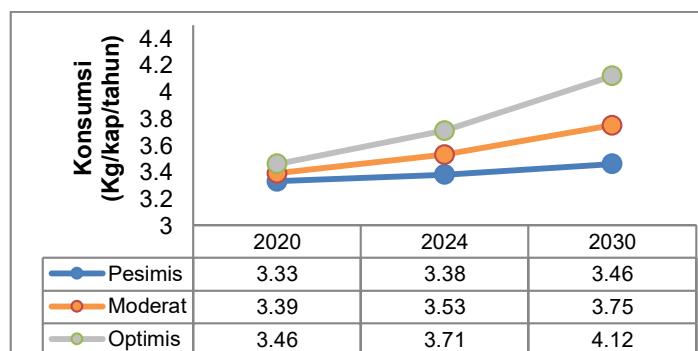
Selain itu pertumbuhan kelas berpendapatan menengah dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipicu oleh perbaikan situasi ekonomi juga akan membawa konsekuensi terhadap pergeseran *food preference* masyarakat menjadi pangan yang lebih

beragam, terutama pangan yang bersumber dari pangan hewani (daging, ikan, telur dan susu), sayur-sayuran dan buah-buahan.

Konsumsi daging unggas sebesar 7,5 kg/kapita/tahun diproyeksikan meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,12 kg/kapita/tahun dan meningkat menjadi 9,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2024. Konsumsi daging sapi diproyeksikan meningkat dari 2,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2017 menjadi 3,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 3,53 kg/kapita/tahun pada tahun 2024. Daging sapi diproyeksikan akan dikonsumsi oleh penduduk dengan pendapatan tinggi di daerah perkotaan, sedangkan daging ayam dikonsumsi oleh penduduk di semua kelas pendapatan.



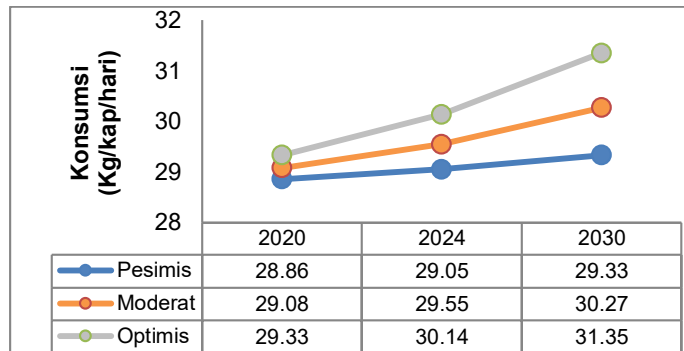
Gambar 22. Proyeksi Konsumsi Daging Unggas (Arifin, B., dkk, 2018)



Gambar 23. Proyeksi Daging Ruminansia (Arifin, B., dkk, 2018)

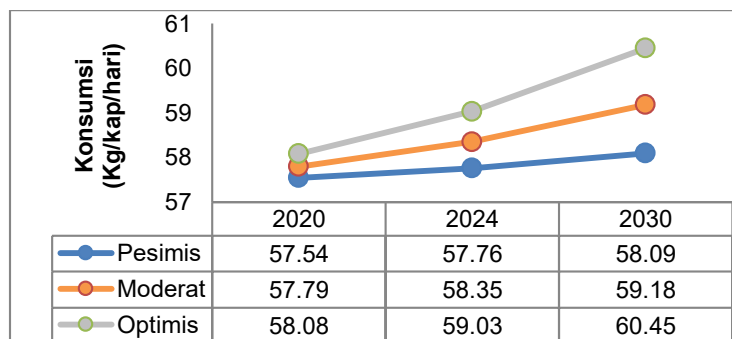
Ikan sebagai komoditas pangan hewani yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia dengan tingkat konsumsi

sebesar 26,2 kg per kapita tahun 2017 diproyeksikan meningkat menjadi 29,08 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 29,55 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.



Gambar 24. Proyeksi Konsumsi Ikan (Arifin, B., dkk, 2018)

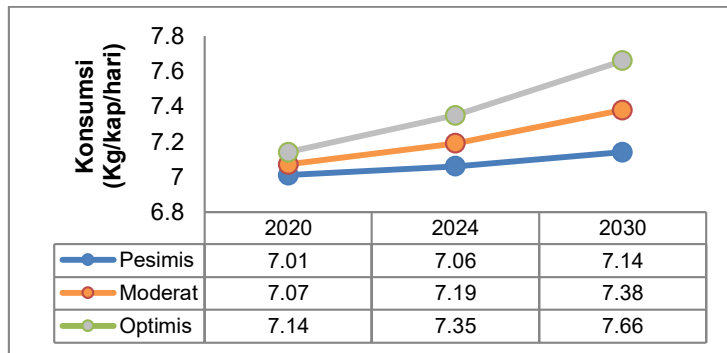
Sejalan dengan konsumsi daging dan ikan, konsumsi sayuran juga diproyeksikan naik dari tahun 2020 sebesar 57,79 kg/kapita/tahun menjadi 58,35 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.



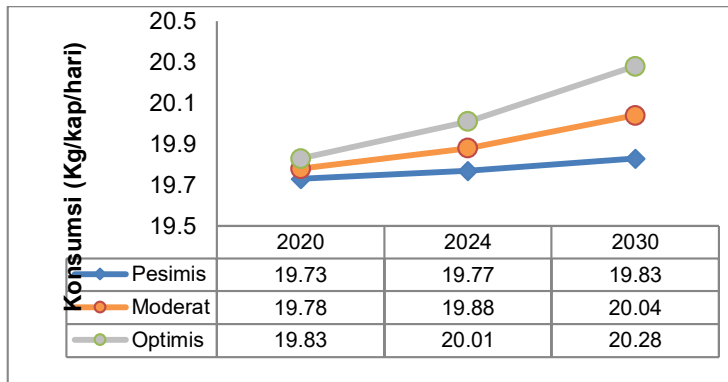
Gambar 25. Proyeksi Konsumsi Sayuran (Arifin, B., dkk, 2018)

Konsumsi telur juga diproyeksikan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 konsumsi telur diperkirakan mencapai 7,07 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2045 meningkat menjadi 7,19 kg/kapita/tahun. Selain itu, peningkatan konsumsi pangan juga diproyeksikan terjadi pada komoditas umbi-umbian. Pada tahun 2020 konsumsi umbi diperkirakan

mencapai 19,78 kg/kapita/tahun dan diperkirakan sedikit mengalami peningkatan menjadi 19,88 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.



Gambar 26. Proyeksi Konsumsi Telur (Arifin, B., dkk, 2018)



3. Gambar 27. Proyeksi Konsumsi Umbi (Arifin, B., dkk, 2018) Arah Penyediaan Pangan

Dari sisi produksi pangan domestik, penyediaan pangan menghadapi berbagai tantangan, diantaranya yang penting adalah kompetisi penggunaan lahan, perubahan iklim, dan *levelling off* peningkatan produktivitas. Produksi pangan di level *off farm* juga dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi preferensi pangan konsumen yang semakin beragam, berkualitas dan aman.

Untuk merespon tantangan di atas, dari aspek pengembangan lahan pertanian, dominasi Jawa sebagai basis produksi pangan di masa

mendatang harus dikurangi. Laju konversi lahan yang sulit dikendalikan selama beberapa tahun terakhir disebabkan karena Jawa merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan negara. Pengembangan sentra produksi baru dengan mengoptimalkan lahan-lahan marginal dan pembangunan kawasan produksi di Indonesia Timur menjadi andalan untuk menggantikan luasan lahan produktif yang terkonversi di Jawa. Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan upaya peningkatan produktivitas usahatani pangan diperlukan penciptaan inovasi teknologi dan percepatan diseminasinya. Teknologi pertanian yang perlu diciptakan adalah teknologi yang mampu mengatasi dan mengantisipasi dampak perubahan iklim, meningkatkan produktivitas usahatani, efisiensi usaha, dan daya saing produk.

Penyediaan pangan juga diarahkan untuk memenuhi permintaan konsumen yang menginginkan beragam jenis bahan pangan terutama sumber protein, buah dan sayur serta mensyaratkan keamanan dan kemudahan saat mengolah untuk dikonsumsi. Keterbukaan informasi global, meningkatnya pendapatan per kapita, pemahaman terhadap kesehatan dan gaya hidup di perkotaan juga berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat. Semua kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan produksi pangan yang lebih memperhatikan sisi pasar/kebutuhan konsumen. Untuk itu ketersediaan teknologi pengolahan pangan yang mampu merespon dinamika permintaan konsumen dan penerapan kaidah keamanan pangan dalam proses produksi menjadi hal yang sangat penting.

Hal lain yang masih sering luput dari perhatian adalah masalah kehilangan dan pemborosan pangan (*loss and waste*). Kehilangan pangan terjadi mulai panen di on farm sampai pangan tersebut didistribusikan. Pemborosan pangan terjadi mulai dari tingkat retail, pada saat pangan dibeli oleh konsumen, disajikan di meja makan,

sampai dengan pada saat pangan tersebut benar-benar dikonsumsi oleh konsumen/anggota rumah tangga. Secara global, data FAO menunjukkan bahwa bahan pangan yang hilang dan terbuang sekitar 1/3 dari produksi pangan dunia. Pangan yang terbuang tersebut diperkirakan terjadi pada tahap produksi sebesar 24-30 persen, pada tahap pasca panen sebesar 20% persen, dan pada tahap konsumsi sebesar 30-35 persen.

Mengingat besarnya persentase kehilangan pangan, maka upaya pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan menjadi sangat penting bagi ketersediaan pangan dan peningkatan cakupan masyarakat yang mampu mengkonsumsi pangan. Pendekatan penanganan kedua aspek tersebut adalah (1) pemanfaatan teknologi panen, pengolahan, distribusi, penyimpanan dan penanganan pangan yang mampu mengurangi kehilangan hasil dan mempertahankan kualitas pangan secara efisien dan (2) sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengurangi pemborosan pangan melalui pendekatan sosial budaya dan agama, serta memperkenalkan pendekatan konsumsi dan pemanfaatan pangan secara bijaksana (*food wise*)

V. KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi 2020-2024 dirancang untuk mencapai sasaran terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi masyarakat secara nasional, wilayah, sampai dengan perseorangan. Kebijakan strategis ini merupakan arahan untuk setiap Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan sistem pangan. Disain kebijakan ini juga dirancang untuk mencapai indikator kinerja pembangunan pangan dan gizi, seperti disajikan dalam Bab VI.

1. Prinsip Dasar Kebijakan Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Pangan No 18 tahun 2012, penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan dan keadilan. Sejalan dengan hal tersebut kebijakan strategis ketahanan pangan strategis dijalankan atas dasar prinsip keadilan, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, kedaulatan dan stabilitas nasional, kemandirian, peran aktif para pihak, keamanan pangan, dan berkelanjutan untuk menghasilkan masyarakat yang sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Penjelasan dari prinsip-prinsip dasar tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Keadilan

Prinsip keadilan dalam konteks ketahanan pangan dapat diartikan kesamaan hak semua warga masyarakat dalam mengakses sumber daya alam, seperti tanah pertanian dan air bersih. Keadilan juga berarti seluruh warga negara/individu berhak mengakses dan mendapatkan pangan yang sesuai bagi dirinya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Keadilan harus tercipta pula antar

berbagai pelaku yang bergerak di sektor pangan. Dimana petani mendapatkan harga yang layak, sementara konsumen menikmati pangan murah. Di sisi lain pelaku usaha dan pedagang menikmati keuntungan pada tingkat wajar.

b. Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut definisi Badan Pusat Statistik, kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup (BPS). Oleh karena itu pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus dapat memberikan manfaat secara fisik untuk menjamin kebutuhan jasmani: pangan tersedia, mudah diakses, bergizi untuk menjalankan hidup yang sehat dan aktif serta menjamin kebutuhan rohani. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup serta tingkat kesejahteraan para pelakunya.

Pemberdayaan masyarakat merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*. Berdasarkan konsep ini, pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus melibatkan peran serta masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya secara berkelanjutan. Pendekatan pemberdayaan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin dalam penyediaan dan pengolahan

pangan, sekaligus dalam meningkatkan partisipasinya pada skala yang lebih luas yaitu pembangunan pangan dan gizi di wilayahnya.

c. Kedaulatan dan Stabilitas Nasional

Dalam konteks ketahanan pangan kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal (UU Pangan No 18 tahun 2012). Dalam hal ini bangsa dan rakyat Indonesia memiliki hak untuk memproduksi pangan secara mandiri dan menentukan sistem pangannya tanpa intervensi dari pasar internasional.

Stabilitas nasional adalah kestabilan atau situasi yang kondusif baik di bidang sosial budaya, politik, pemerintahan, keamanan, perekonomian, perdagangan, dan bidang-bidang lainnya, sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik, rakyat bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, dan program-program serta kebijakan pemerintahan bisa dilaksanakan secara optimal. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang merupakan upaya yang dilaksanakan untuk menjamin stabilitas nasional.

d. Kemandirian

Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat (UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Terdapat 3 aspek dalam Kemandirian Pangan:

- Produksi pangan yang beraneka-ragam dari dalam negeri yaitu adanya produksi pangan yang bersumber dari dalam negeri dan tidak bergantung dari luar (impor), serta tidak hanya satu komoditas saja tetapi beragam komoditas, termasuk komoditas yang termasuk dalam pangan lokal.
- Menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat perseorangan yaitu pangan harus terpenuhi bukan hanya sampai dengan tingkat rumah tangga tetapi sampai dengan tingkat perseorangan atau individu, dengan memperhatikan jenis kelamin, usia, dan karakteristik lainnya.
- Memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal yaitu produksi pangan dalam negeri harus dimaksimalkan dengan melihat potensi yang ada, misal potensi lahan, keragaman potensi sumber daya tiap daerah, dan pemanfaatan teknologi.

e. Peran aktif para pihak

Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penanganan multidisiplin. Seluruh pemangku kepentingan di bidang pangan dan gizi yaitu pemerintah, pemerintah daerah, lembaga legislatif, pelaku usaha, filantropi, lembaga swadaya masyarakat, media, akademisi, lembaga pengkajian, komunitas madani di pusat dan daerah serta masyarakat harus berperan aktif dalam pembangunan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.

f. Keamanan Pangan

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Jaminan keamanan pangan harus diberikan mulai dari aspek produksi pangan, distribusi sampai dengan pemanfaatan pangan (*form farm to fork concept*)

g. Keberlanjutan

Keberlanjutan merupakan proses yang berlangsung terus-menerus, tidak putus dan berkesinambungan. Pasal 3 Undang-Undang Pangan No 18 tahun 2012 mengamanatkan penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Prinsip keberlanjutan harus dikedepankan sehingga pembangunan ketahanan pangan dan gizi yang dilaksanakan saat ini dapat memberikan manfaat tidak hanya pada generasi saat ini tetapi juga kepada generasi yang akan datang.

Prinsip dasar kebijakan strategis yang diterapkan juga mengacu dan tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional, antara lain:

- i. *Five Rome Principles for Sustainable Global Food Security 2009* yang tertuang dalam *Declaration of the World Summit on Food Security*
 - a. *Invest in country-owned plans based on programmes and partnerships.*
 - b. *Foster strategic coordination at national, regional and global level*
 - c. *Twin-track approach to food security: (1) direct action and 2) medium-and long-term action*
 - d. *Ensure a strong role for the multilateral system*

e. *Ensure sustained and substantial commitment to investment in agriculture and food security and nutrition*

ii. *Harmonisasi regulasi/standar Food Safety*

Indonesia juga melakukan harmonisasi standar dan regulasi internasional Codex sebagai jaminan mutu dan keamanan pangan yang diproduksi di dalam negeri baik untuk tujuan ekspor maupun konsumsi domestik. Regulasi lainnya seperti *Sanitary Phyto Sanitary (SPS) agreement* juga dijadikan rujukan terkait dengan perdagangan internasional. Untuk meningkatkan awareness terhadap *Anti Microbial Resistance (AMR)* Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional AMR 2017-2019 sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta tenaga kesehatan;
- b. membangun sistem surveilans nasional AMR;
- c. mencegah dan mengendalikan infeksi;
- d. mengoptimalkan penggunaan antimikroba dengan bijak
- e. mendorong investasi berkelanjutan untuk riset dan pengembangan obat, vaksin, dan intervensi lain.

iii. *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*

Sebagai anggota dari organisasi perserikatan bangsa-bangsa, Indonesia dituntut untuk ikut berperan bagi pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dari 17 target SDGs, target 1 *end poverty in all its forms*; target 2 *zero hunger*; target 3 *health*; target 6 *water and sanitation*; target 12 *sustainable consumption and production*; dan target 13 *combat climate change* yang merupakan target yang berhubungan dengan pembangunan ketahanan pangan dan gizi. Target-target tersebut telah menjadi target yang ditetapkan dalam RPJMN Bappenas seperti target

penurunan stunting, target penurunan kerawanan pangan sebesar 1% per tahun, peningkatan produksi pangan serta peningkatan konsumsi pangan.

iv. G20 Osaka Summit 2019

Kesepakatan pada G20 Osaka Summit 2019 dimana pembangunan pertanian difokuskan untuk mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.

Prinsip dasar dan kesepakatan internasional tersebut dijadikan acuan dalam memujudkan masyarakat sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

2. Aspek Kebijakan Strategis

Kebijakan strategis yang disusun mencakup aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan dengan memperhatikan keamanan pangan pada setiap aspek ketahanan pangan dan gizi.

2.1. Ketersediaan Pangan

a. Meningkatkan Produksi Pangan yang Beragam

1. Mengakselerasi pemanfaatan lahan sub optimal, lahan tidur, wilayah perbatasan dan daerah rentan rawan pangan.
2. Mengharuskan penerbitan Perda lahan pertanian produktif berkelanjutan.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan.
4. Mendorong lahirnya inovasi dan penerapannya untuk peningkatan produktivitas, efisiensi produksi, kehilangan hasil, dan produk pangan yang beragam.
5. Mengembangkan inovasi teknologi untukantisipasi dan mitigasi perubahan iklim dan kontinuitas produksi sepanjang tahun.

6. Memberdayakan rumah tangga untuk penyediaan pangan yang beragam melalui pemanfaatan pekarangan dan media lainnya.
7. Mengembangkan industri pangan olahan berbahan baku lokal.
8. Melanjutkan perlindungan perairan dari pencurian ikan dan intervensi asing serta cemaran senyawa kimia dan sampah plastik
9. Mendorong pengembangan korporasi usaha tani hulu-hilir
10. Mendorong tumbuhnya pendidikan vokasi dan entrepreneurship untuk meningkatkan minat generasi muda di bidang pertanian.

b. Memperkuat cadangan pangan untukantisipasi ancaman ketersediaan pangan

1. Mendorong penerbitan Perda cadangan pangan Provinsi dan Kabupaten.
2. Mengembangkan sistem informasi cadangan pangan.
3. Mengembangkan infrastruktur penyimpanan produk.
4. Mengembangkan sistem pengelolaan cadangan pangan berbasis *disposal stock*.

c. Menyediakan Pangan yang Aman

1. Mengembangkan dan memperkuat penerapan regulasi dan NSPK (GAP, GHP, GMP, dll.) untuk menjamin keamanan dan mutu pangan serta daya saing.
2. Memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan baik segar maupun olahan oleh lembaga berwenang pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat SDM dan infrastruktur keamanan pangan.

2.2. Keterjangkauan Pangan

a. Keterjangkauan Fisik

1. Mengembangkan sistem logistik pangan (peningkatan produksi, perbaikan sistem distribusi, dan peningkatan peran pelaku) yang efektif dan efisien.
2. Memanfaatkan perdagangan internasional pangan yang mengutamakan produksi dalam negeri dan cadangan pangan.

b. Keterjangkauan Ekonomi

1. Menjaga stabilitas harga pangan pokok dan penting.
2. Menyediakan insentif untuk keberlanjutan UMKM distribusi pangan.
3. Memperluas akses sistem informasi pasar dan harga pangan untuk mencegah terjadinya perilaku spekulatif.

c. Keterjangkauan Sosial

1. Mengembangkan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam.
2. Menyediakan dan menyalurkan pangan untuk situasi darurat sesuai kondisi wilayah dan kelompok umur/fisiologis yang terdampak bencana.
3. Menumbuhkan kemandirian pangan untuk masyarakat terdampak bencana.

2.3. Pemanfaatan Pangan

a. Pemenuhan Kebutuhan Gizi

1. Mengedukasi Pola Konsumsi Pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) pada setiap keluarga sejak usia dini.

2. Meningkatkan konsumsi protein hewani untuk mengatasi masalah gizi miko.
3. Membangun Sistem Pengendalian *food waste*.
4. Mengutamakan pemberian ASI eksklusif, ASI sampai umur 2 tahun, serta penyediaan dan pemanfaatan MP-ASI berbasis pangan lokal.
5. Menyediakan makanan tambahan bergizi untuk anak sekolah prioritas di daerah rentan rawan pangan.
6. Mendorong peningkatan penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi.
7. Mendorong peningkatan jumlah tenaga dan layanan kesehatan (posyandu) secara merata untuk seluruh masyarakat.

b. Memperkuat Sistem Surveilans Pangan dan Gizi

1. Memperkuat Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Pemantauan Status Gizi (PSG) sebagai *early warning* sistem kerawanan pangan transien.
2. Memutakhirkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) setiap tahun sebagai salah satu acuan penanganan kerentanan pangan dan gizi kronis.

c. Jaminan Keamanan Pangan

Melanjutkan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan.

2.4. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi

Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah daerah, lembaga legislatif, pelaku usaha, filantropi, LSM, media, akademisi dan lembaga pengkajian serta komunitas madani di pusat dan daerah).

VI. SASARAN

Sasaran penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi adalah terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi masyarakat secara nasional, wilayah, sampai dengan perseorangan.

Indikator umum untuk pencapaian sasaran tersebut ada dua yang saling terkait satu dengan lainnya, yaitu:

1. Tersedianya pangan yang: (i) cukup, mutu yang baik, memenuhi persyaratan keamanan pangan, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata antar daerah, waktu dan golongan pendapatan, terjangkau oleh daya beli masyarakat; (ii) tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; (iii) didukung oleh lingkungan sanitasi dan layanan kesehatan yang memadai.
2. Terwujudnya status gizi sumber daya manusia Indonesia sesuai standar kecukupan untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan mengacu kepada sasaran teknokratis RPJMN 2020-2024 dan dijabarkan dalam beberapa sasaran spesifik meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan. Target yang akan dicapai hingga Tahun 2024 disampaikan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran, Indikator dan Target Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	
		2019	2024
Global Food Security Index		62,6	69,8
KETERSEDIAAN PANGAN			
Kemampuan produksi pangan domestik	Produksi pangan:		
	- Jagung	24,8 juta ton	35,3 juta ton
	- Umbi-umbian	23,3 juta ton	25,5 juta ton
	- Kedelai ***	1,12 juta ton	1,6 juta ton
	- Gula Pasir ***	2,19 juta ton	2,30 juta ton
	- Bawang Merah ***	1,54 juta ton	1,63 juta ton
	- Bawang Putih ***	56,59 ribu ton	122,29 ribu ton
	- Daging	3,8 juta ton	4,9 juta ton
	- Ikan	14,8 juta ton	20,4 juta ton
	- Rumput laut	9,9 juta ton	12,3 juta ton
	- Garam	2,8 juta ton	3,4 juta ton
	Ketersediaan Pangan:		
	- Beras	38,4 juta ton	46,8 juta ton
	- Protein hewani	2,4 juta ton	2,9 juta ton
	Peningkatan Produksi:		
	- Buah-buahan	3,5%	5,7%
	- Sayuran	2,5%	3,1%
	- Kelapa Sawit	5,7%	6%
	- Kakao	1,7%	2,7%
	- kopi	1,4%	1,5%
	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%)	50	100

	Luas lahan Produksi beras biofortifikasi	195 ha padi	200.000 ha padi
	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi	480 ton	100% penerima BPNT
	Persentase pangsa pangan organik	2%	20%
	Penggunaan benih bersertifikat	53%	80%
	Teknologi yang diterapkan oleh petani	65%	80-95%
	Jumlah hasil riset kemaritiman, kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan	5%	15%
	Kawasan klaster sentra produksi perikanan budidaya unggulan	10	50
	Pembangunan jaringan irigasi baru	1.000.000 ha	500.000 ha
	Peningkatan Persentase irigasi premium	12,3%	16,4%
	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	30 varietas unggul tanaman baru dan 8 galur Hewan ternak	30 varietas unggul tanaman baru dan 8 galur Hewan ternak
	Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	4.250 aksesi	4.250 aksesi

Pengembangan cadangan pangan	Cadangan Beras Pemerintah*	1,5 juta ton	2 juta ton
	Cadangan Beras Pemerintah Provinsi**	Minimal 200 ton, selebihnya mengacu pada Permentan 11/2018 tentang Cadangan Beras Pemerintah Daerah	
	Cadangan Beras Pemerintah Kab/Kota**	Minimal 200 ton, selebihnya mengacu pada Permentan 11/2018 tentang Cadangan Beras Pemerintah Daerah	
KETERJANGKAUAN			
Kemampuan memperoleh pangan	Proporsi rumah tangga untuk pengeluaran pangan >65% **	29%	Menjadi 20%
	Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (PDB pertanian dibagi dengan jumlah pekerja sektor pertanian)	46,9 juta rupiah/tenaga kerja/tahun	59,9 juta rupiah/tenaga kerja/tahun
	Nilai Tukar Petani (NTP)	100	105
	Nilai Tukar Nelayan	100	107
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	100	105
Stabilitas harga pangan	Inflasi pangan bergejolak Koefisien variasi harga pangan nasional *** <ul style="list-style-type: none"> • Beras • Cabai • Bawang Merah • Telur Ayam 	4,3% <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 5% • ≤ 25% • ≤ 20% 	3,1% <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 5% • ≤ 20% • ≤ 17%

	<ul style="list-style-type: none"> • Daging Ayam 	<ul style="list-style-type: none"> • $\leq 10\%$ • $\leq 10\%$ 	<ul style="list-style-type: none"> • $\leq 10\%$ • $\leq 10\%$
PEMANFAATAN			
Kecukupan pangan dan gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.121 Kkal/kapita/hari	2.100 Kkal/kapita/hari
	Angka Kecukupan Protein (AKP)	62,9 gram/kap/hari	57 gram/kap/hari
	Skor PPH	86,4	95,2
	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PUoU)	6,7	5
	Proporsi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	5,8	4
	Konsumsi ikan	50,7 kg/kap/tahun	62 kg/kap/thn
	Konsumsi daging	13,2 kg/kap/tahun	14,6 kg/kap/thn
	Konsumsi sayur dan buah	244,3 gram/kap/hr	316,3 gr/kap/hr
	Konsumsi protein asal ternak	10,9 g/kpita/hari	11 g/kapita/hari
Keamanan Pangan	Persentase makanan memenuhi syarat	76% (BPOM, 2019)	86%

	Presentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	94	85-95%
Status gizi pada bayi dan balita	Prevalensi balita wasting (kurus dan sangat kurus)	10,2% (Risksdas 2018)	7%
	Prevalensi balita stunting (pendek dan sangat pendek)	27,7% (SSGB 2009)	14%
Status gizi dewasa	Prevalensi obesitas pada penduduk \geq 18 tahun	21,8% (Risksdas 2018)	21,8%

* Rakortas Menko Ekonomi

** Badan Ketahanan Pangan

*** Rakortas Kementan

VII. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Tindak lanjut dari kebijakan strategis ketahanan pangan dan gizi antara lain adalah:

1. Penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Daerah Ketahanan Pangan dan Gizi (RAN dan RAD-KPG)

Seluruh Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-KPG) dan Rencana Aksi Daerah Ketahanan Pangan dan Gizi (RAD-KPG) disusun dengan kerangka kerja untuk dilaksanakan oleh K/L dan Pemda secara terintegrasi dan bersinergi antar pemangku kepentingan dalam kesatuan pembangunan pangan.

2. Merumuskan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi (KSKPG) 2020-2024

Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi (KSKPG) 2020-2024 selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Presiden.

VIII. PENUTUP

KSPG 2015-2024 merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembangunan sistem pangan yang terintegrasi dan terkoordinasi di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang cukup untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Hasil akhir yaitu terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing di lingkungan global.

Untuk mengimplemetasikan RAN-KPG di pusat dan daerah, posisi Dewan Ketahanan Pangan sangat strategis dalam melaksanakan koordinasi guna menggalang kesamaan gerak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi kegiatan pembagunan ketahanan pangan dan gizi. Koordinasi lintas sektor atau K/L, pusat-daerah dan antarwilayah yang efektif akan meningkatkan efisiensi dan keberhasilan peaksanaan program.



2020
-
2024

Sekretariat:



Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian/
Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan
Kampus Kementerian Pertanian, Gedung E Lantai 4
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan